

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa menjadi unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan desa, termasuk pemberdayaan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembangunan yang dilakukan dapat berupa infrastruktur yang dapat berdampak pada perekonomian lokal masyarakat desa serta mengurangi angka kemiskinan, (Sukorambi & Jember, 2025). Salah satu bentuk pemberdayaan dari pemerintah ialah berupa otonomi desa, yaitu desa dapat mengelola sumber daya secara mandiri dan adaptif melalui BUMDes, (Soejono et al., 2021). Dalam Undang-Undang ini telah menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan potensi yang ada dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa mandiri dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Desa, telah dijelaskan pada Permendes Nomor 4 Tahun 2015 mengatur secara rinci mengenai pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes, sehingga BUMDes dapat menjalankan fungsi sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi desa. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 memberikan panduan yang lebih komprehensif terkait tata kelola BUMDes yang profesional dan transparan, sekaligus mengatur mekanisme evaluasi kinerja guna memastikan keberlanjutan dan kontribusi nyata terhadap perekonomian desa.

Pemberian anggaran desa atau biasa disebut dana desa atau APBDes menjadi usaha pemerintah khususnya pada hal pelaksanaan atau pengimplementasian program atau kegiatan yang sudah disusun saat perencanaan berlangsung untuk pembangunan desa, (Imaningtyas, 2022). Walaupun desa telah mendapatkan sumber pendapatan dari APBDes tetap

diperlukan juga Suatu badan untuk mengurus aset desa dan memperolah sumber pendapatannya sendiri. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, (Rahayu & Febrina, 2021). Sumber Pendapatan Asli Desa salah satunya adalah pendirian BUMDes guna menghindari ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat. PADes dipandang sebagai patokan mengenai berkembang atau tidaknya suatu desa, (Evianti et al., 2024). Disebutkan pada PP No. 11 Tahun 2021 Pasal 10 bahwasannya pendirian BUMDes dilandasi dengan adanya apa yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat, penuntasan masalah, ketepatan usaha, tipe.

Kinerja dalam hal ini adalah sesuatu yang krusial terutamanya dalam konteks bentuk hasil dari sebuah pekerjaan yang telah diraih oleh perorangan atau organisasi yang merupakan salah satu bentuk kewajiban atau tanggung jawab. Rukin (2021) mengatakan bahwa kinerja memiliki keterkaitan yang kuat atas capaian tepat sebuah organisasi, puasnya masyarakat dan mampu memberikan peran terhadap ekonomi. Hasil kerja BUMDes memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan atau usaha-usaha ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa, (Risalah & Eriswanto, 2023). Dapat ditandai dengan naiknya angka ekonomi desa apabila kinerja BUMDes baik atau maksimal, dan sebaliknya apabila kinerja BUMDes buruk maka hanya dapat memberikan beban bagi keuangan desa yang dikarenakan sumber yang diberikan pada BUMDes merupakan sumber yang asalnya dari keuangan desa.

BUMDes Cakrawaringin Jati didirikan di Desa Poncol Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan pada 27 September 2021 dan tertulis di PerDes Nomor 14 Tahun 2021 berkaitan dengan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cakrawaringin Jati. Dimana pengusulan atas dibentuknya BUMDes ini adalah salah satu jalan yang tepat dalam upaya untuk mewujudkan

pembangunan desa. BUMDes ini membawahi beberapa unit usaha antara lain:

Tabel 1. 1 Unit Usaha Bumdes Cakra Waringin Jati

| No. | Unit Usaha                         |
|-----|------------------------------------|
| 1.  | Usaha Jasa Penyewaan Molen         |
| 2.  | Usaha Pelayanan Pajak Kendaraan    |
| 3.  | Usaha Pelayanan Pembayaran Listrik |
| 4.  | Usaha Pembuatan Batako             |

Sumber: Profil BUMDes Desa Poncol

### 1. Potensi

Tabel 1. 2 Potensi Pengembangan Usaha Bumdes Cakra Waringin Jati

| No. | Potensi                              | Kondisi Harapan  | Strategi Memanfaatkan Potensi   |
|-----|--------------------------------------|--|---|
| 1.  | Kebutuhan Pertanian dan Pembangunan  | Terpenuhinya alat yang mendukung pembangunan dan pertanian dimana mayoritas warga poncol adalah seorang potensi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan alat berat</li> <li>- Menjadi supplier alat ataupun pupuk guna mendukung pembangunan dan pertanian di Desa Poncol.</li> </ul>  |
| 2.  | Destinasi Wisata Embung Songgolangit | Mampu mengelola Embung Songgolangit dan menjadikan Desa Poncol menjadi Desa Wisata                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan alat dan bahan penunjang pariwisata</li> <li>- Melakukan branding wisata</li> <li>- Membentuk kelompok darwis dari pemuda poncol</li> <li>- Perawatan rutin Embung Desa</li> </ul> |

### 2. Prospek Usaha

Tabel 1. 3 Prospek Pengembangan Usaha Bumdes Cakra Waringin Jati

| No. | Prospek Usaha   | Produk/Kegiatan yang dihasilkan                                |
|-----|-----------------|--|
| 1.  | Kopi Mbah Cokro | Kopi asli Poncol   |
| 2.  | MiniATM BumDes  | Pelayanan transfer, tarik tunai, pembayaran BPJS, cicilan, dll |

|    |   |                                |
|----|---|--------------------------------|
| 3. | Suplier Produksi Bahan Pertanian dan Bangunan | Toko pertanian dan pembangunan |
|----|---|--------------------------------|

*Sumber: Profil BUMDes Desa Poncol*

Dalam Peraturan Desa Poncol Nomor 3 Tahun 2022 telah dijelaskan secara spesifik mengenai pengelolaan dan pengembangan BUMDes di Desa Poncol. Regulasi ini mengatur tugas, fungsi, dan mekanisme kerja BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya BUMDes Cakra Waringin Jati masih belum mampu berfungsi secara optimal. Sebagian besar unit usaha dari BUMDes Cakra Waringin Jati masih menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya manajemen usaha, rendahnya efisiensi operasional, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sehingga kondisi ini juga berdampak pada rendahnya kontribusi BUMDes Cakra Waringin Jati terhadap perekonomian desa secara nyata.

Dari tabel tersebut nantinya akan di evaluasi untuk mengetahui sejauh mana lembaga ini mampu menjalankan peran strategisnya. Dalam hal ini, kinerja BUMDes tidak hanya dilihat dari besarnya keuntungan finansial, tetapi juga dari efisiensi pengelolaan, kualitas tata kelola, serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses usaha dan mendapatkan manfaat dari keberadaannya. Evaluasi kinerja secara menyeluruh dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan BUMDes Cakra Waringin Jati sehingga dapat menjadi dasar perbaikan ke depan.

Dalam melaksanakan evaluasi pada pelaksanaan program yang ditetapkan maka dibutuhkan spesifikasi guna keberhasilan di dalamnya dapat diukur. Evaluasi hasil kerja dari BUMDes dapat diukur keberhasilannya dalam kriteria evaluasi kinerja antara lain:

#### 1. Pendapatan

Pengukuran ini meliputi faktor naiknya PADes yang berasal dari laba dan keuntungan usaha BUMDes, yang kemudian didistribusikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, evaluasi juga melibatkan pemeriksaan dampak keberadaan BUMDes terhadap

pendapatan masyarakat desa secara individu atau kelompok, seperti pembukaan lowongan pekerjaan, penggunaan tenaga kerja setempat, dan peningkatan UMKM yang terhubung dengan BUMDes. Secara keseluruhan, kinerja BUMDes dapat dinilai efektif jika mampu menciptakan nilai tambah ekonomi secara merata dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan

## 2. Efisiensi

Kriteria Efisiensi ini diukur melalui BUMDes yang mampu mengelola SDM, keuangan, dan material guna meraih hasil yang optimal melalui biaya yang minimal. Pengelolaan usaha yang tidak pemborosan dan produktif, seperti penggunaan teknologi yang tepat guna, dan mengurangi pemborosan, adalah aspek efisiensi ini. Kesuksesan BUMDes juga menunjukkan bagaimana mereka memaksimalkan aset desa, memperpendek jalur distribusi, dan mengelola rantai pasokan.

## 3. Tata Kelola BUMDes

Pengukuran melalui tata kelola BUMDes diukur dari Keberhasilan BUMDes dapat ditinjau dari sejauh mana transparansi diterapkan, seperti melalui pembuatan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat desa serta tanggung jawab pengurus dalam menampilkan hasil usaha secara rutin. Selain itu, perencanaan yang strategis dengan menggunakan potensi lokal dan pemantauan kinerja secara berkelanjutan juga menjadi faktor kunci yang mendukung keberhasilan pengelolaan.

## 4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat ditinjau melalui kontribusi ide, tenaga, atau modal, serta partisipasi mereka sebagai konsumen maupun mitra usaha BUMDes. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin besar peluang BUMDes untuk mengembangkan usaha yang sehubungan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, partisipasi yang tinggi juga menciptakan rasa memiliki di kalangan warga, sehingga meningkatkan dukungan terhadap keberlangsungan BUMDes. Dengan

melibatkan masyarakat secara langsung, BUMDes tidak hanya bermanfaat sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat fondasi ekonomi desa secara berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan kriteria pengukuran kinerja tersebut dapat diketahui apakah kinerja BUMDes sudah sesuai dengan kriteria pendapatan, efisiensi, tata kelola, dan partisipasi masyarakat. Sehingga dalam mengevaluasi kinerja yang ada bisa dilihat hambatan yang terjadi dan perlu diselesaikan oleh BUMDes tersebut.

Dalam penelitian terdahulu (MAWADDA WARAHMA, 2021), mengidentifikasi Evaluasi BUMDes di Desa Babul Makmur, yang terletak di Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue. Sementara evaluasi kinerja BUMDes telah diselesaikan secara keseluruhan, pelaksanaannya masih belum optimal. Ini karena tujuan BUMDes untuk meningkatkan ekonomi desa belum tercapai. BUMDes Babul Makmur memenuhi semua kebutuhan, tetapi proses pengelolaannya masih kurang tepat. BUMDes Babul Makmur dikelola dan dijalankan dengan baik, tetapi ada beberapa hambatan yang menghambat prosesnya. Kendala tersebut berasal dari sumber internal, yaitu kemampuan pengurus untuk mengelola masalah dan terdapat hambatan dari luar, yang menghasilkan kontribusi warga yang rendah. Mungkin berdampak negatif pada pengelolaan BUMDes Babul Makmur.

Berdasarkan hasil penggalan data dan penelitian terdahulu, peneliti memiliki tujuan guna mengevaluasi kinerja BUMDes dan menjadikan studi secara deskriptif dengan judul “Evaluasi Kinerja BUMDes Terhadap Peningkatan Perekonomian Desa (Studi di BUMDes Cakrawaringin Jati Desa Poncol Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Evaluasi Kinerja BUMDes Cakrawaringin Jati terhadap peningkatan perekonomian di Desa Poncol?

2. Faktor apa saja yang menjadi kendala BUMDes Cakrawaringin Jati terhadap peningkatan perekonomian desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya riset ini adalah bentuk kalimat yang memperlihatkan bahwa terdapat sebuah hasil di dalamnya, suatu yang akan didapatkan ketika riset telah selesai dilaksanakan serta sebuah hal yang akan diraih selama proses riset berjalan. Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dari penelitian “Evaluasi Kinerja BUMDes Terhadap Peningkatan Perekonomian Desa: Studi Penelitian di BUMDes Cakrawaringin Jati Desa Poncol Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan” adalah

1. Guna mencari tahu bagaimana kinerja BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal di Desa Poncol.
2. Guna mencari tahu faktor apa saja yang menjadi kendala BUMDes Cakrawaringin Jati terhadap peningkatan perekonomian desa?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam sebuah riset dapat diartikan sebagai suatu hal yang akan diperoleh dari sebuah riset atau penelitian pada saat tujuan dari adanya penelitian telah tercapai. Dalam sebuah riset biasanya digolongkan atas dua bentuk manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diartikan manfaat dengan sumber dari adanya tujuan riset itu sendiri guna memastikan teori yang telah muncul. Adanya riset ini dilakukan harapannya adalah mampu memberikan sumbangan kontribusi terhadap banyak pihak dan sumbangsih pengembangan teori terkhusus dalam kajian masalah evaluasi kinerja BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa.

2. Manfaat Praktis

Berbeda dengan manfaat teoritis, manfaat praktis ini biasanya mampu dirasakan secara langsung oleh berbagai komponen riset. Harapannya adalah riset ini mampu menyumbangkan pengetahuan dan saran bagi BUMDes Desa Poncol Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, atau

bisa sebagai bahan untuk mengkaji dan masukan ide bagi tenaga pendidik maupun praktisi masyarakat yang dapat menopang riset berikutnya dan akan menjadi sumber perbandingan bagi penellitian yang lain.

## **1.5 Definisi Konseptual**

### **1. Evaluasi**

Dalam bukunya Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan M. Abdullah (2014) mennjelaskan bahwa evaluasi merupakan proses sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk menilai, mengukur, serta membandingkan hasil kerja seorang karyawan dengan standar, indikator, atau target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akhir, tetapi juga memperhatikan proses kerja, etos kerja, serta kemampuan individu dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara profesional. Dengan kata lain, evaluasi tidak hanya melihat "apa yang dihasilkan", tetapi juga "bagaimana cara menghasilkan" suatu pekerjaan. Abdullah menekankan bahwa proses evaluasi harus dilakukan secara objektif, transparan, dan adil agar hasilnya dapat dijadikan dasar yang kuat dalam meningkatkan efektivitas kerja, memotivasi karyawan, serta memperkuat struktur manajerial dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan kerja. Evaluasi juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keseimbangan antara kinerja individu dan pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh.

### **2. BUMDes**

Menurut Ely Triyo (2020)BUMDes adalah hak desa yang diberikan oleh Undang-Undang Desa kepada pemerintah desa agar bisa berinovasi dalam pembangunan, terutama untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Rosari et al.,

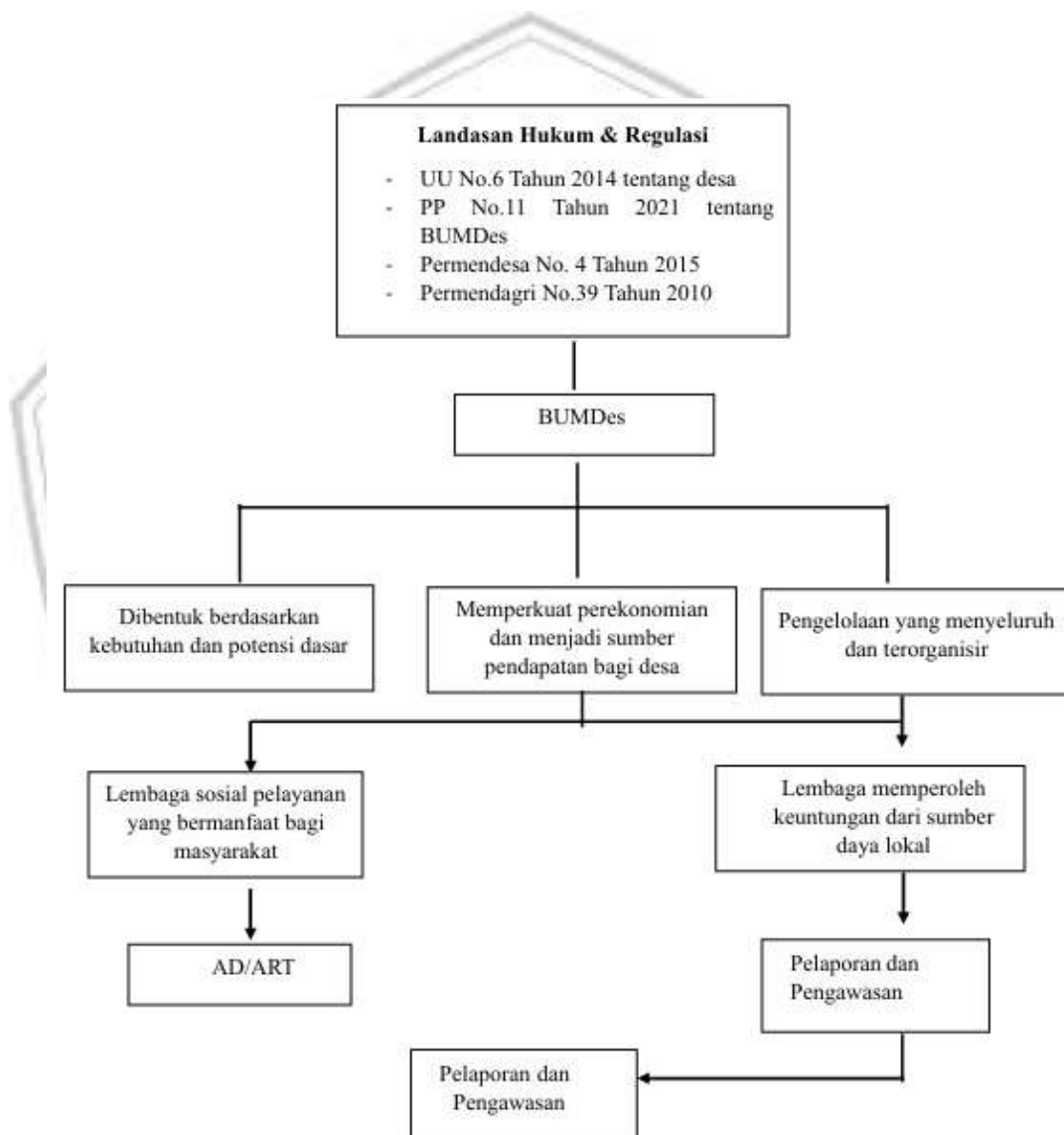
2022). Oleh karena itu, BUMDes menjadi harapan besar bagi warga desa dalam memperkuat ekonomi lokal, dengan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Agar BUMDes berjalan dengan baik, pengelolaannya harus dilakukan secara menyeluruh dan terorganisir. Ini berarti dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan memenuhi standar yang ditentukan dalam aturan dasar BUMDes (AD/ART). Proses pemilihan pegawai atau manajer pun harus mengikuti aturan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang menjelaskan tujuan utama dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber pendapatan bagi desa. Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun, (Baharuddin et al., 2023). Salah satu indikator keberhasilan BUMDes adalah apabila unit usaha yang dijalankan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan desa yang masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 yang merupakan pedoman resmi yang mengatur tata cara pendirian, pengelolaan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintah desa. Peraturan ini menekankan bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa desa berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki desa tersebut, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa BUMDes dapat menjalankan berbagai unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta dikelola secara profesional oleh masyarakat dan pemerintah desa secara kolektif. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan, (Ridlwani, 2015).

Permendagri ini juga mengatur tentang struktur organisasi BUMDes, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), pembagian keuntungan, serta pentingnya pelaporan dan pengawasan.

Sebagai badan usaha yang ingin mendapatkan keuntungan, BUMDes juga perlu bekerja sama dengan pihak luar secara terbuka, dan setiap kerja sama harus disetujui oleh Dewan Komisaris. Semua kegiatan pengelolaan harus transparan dan terdokumentasi dengan baik agar pemerintah desa dan masyarakat bisa mengawasi dan menjaga keseimbangannya. Menurut Pasal 213, BUMDes adalah badan usaha yang sah secara hukum dan diatur dalam undang-undang. Usaha ini dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat, dengan tujuan utama untuk memperkuat perekonomian desa (Hayati, 2021). BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa masing-masing. Dalam pelaksanaannya, BUMDes menjadi bagian penting dalam mendorong kegiatan ekonomi di desa dan memiliki dua peran utama, yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga bisnis.

Sebagai lembaga sosial, BUMDes berperan memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara sebagai lembaga bisnis, BUMDes bertujuan memperoleh keuntungan dengan mengelola dan menjual sumber daya lokal. Pemerintah sendiri sudah sejak lama memperhatikan pengembangan ekonomi desa, dan mendukungnya melalui berbagai program dan kebijakan yang dilakukan secara terus-menerus. Mengacu pada penjelasan dari BPS, pendapatan asli desa yaitu sumber penerimaan desa dari pelbagai usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dengan maksud untuk memenuhi pembiayaan pembangunan, (Muhammad Frengki et al., 2023). Pendirian BUM Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Untuk itu, perlu upaya yang serius untuk pengelolaan BUM Desa agar mampu berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri (Humaira, 2022).



### 3. Perekonomian Desa

Menurut (R. Abdullah, 2011), perekonomian desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang harus

dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya, gotong royong, dan partisipasi masyarakat. Pendapatan desa ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun secara partisipatif oleh kepala desa dan badan perwakilan desa, dengan tujuan mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Razali Abdullah juga menekankan pentingnya pemberdayaan potensi desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa. BUMDes diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, (et al., 2019). BUMDes berperan dalam mengelola aset dan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan desa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pengelolaan keuangan desa yang baik, termasuk pengelolaan BUMDes, menjadi indikator keberhasilan otonomi daerah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi desa

### **1.6 Definisi Operasional**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian desa. Adapun definisi operasional yang digunakan dijabarkan ke dalam beberapa aspek sebagai berikut:

#### **a. Pendapatan**

Pada kriteria pendapatan adalah total dari pemasukan atau revenue yang diperoleh BUMDes dari seluruh unit usaha yang dijalankan dalam satu periode tertentu, dimana mencerminkan kemampuan BUMDes dalam menghasilkan keuntungan secara keberlanjutan. Indikator pengukuran pendapatan di dapatkan dari

1. Total pendapatan tahunan BUMDes. Presentase peningkatan pendapatan dibanding tahun sebelumnya
2. Kontribusi Pendapatan BUMDes terhadap PAD
3. Diversifikasi sumber pendapatan (Jumlah unit usaha aktif) dengan skala pengukuran Rasio dalam satuan mata uang dan presentase.

b. Efisiensi

Pada kriteria efisiensi perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan, mencerminkan seberapa optimal sumber daya BUMDes (modal, tenaga kerja, waktu) digunakan dalam menghasilkan produk/jasa. Indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain rasio biaya operasional terhadap pendapatan, produktivitas tenaga kerja, tingkat penggunaan aset tetap, kecepatan perputaran modal.

c. Tata Kelola

Pada kriteria tata kelola praktik pengelolaan BUMDes yang mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain

1. Ketersediaan laporan keuangan dan operasional secara berkala
2. Audit internal atau eksternal BUMDes, struktur organisasi yang jelas dan fungsional
- d. Partisipasi Masyarakat

Pada kriteria partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil kegiatan BUMDes. Indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain:

1. Jumlah tenaga kerja yang terlibat sebagai tenaga kerja atau pengelola
2. Tingkat keikutsetaan masyarakat dalam penyediaan modal (Investasi) dalam unit usaha BUMDes
3. Jumlah unit usaha BUMDes yang melibatkan masyarakat sebagai mitra.

### **1.7 Metode Penelitian**

2. Pendekatan dan jenis penelitian

Dari konflik yang telah diuraikan, penulis memiliki keterkaitan untuk melaksanakan riset dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah studi penelitian. Pendekatan kualitatif dipakai untuk mengkaji suatu objek dalam keadaan yang natural, dengan peneliti yang mengambil peran sebagai

instrumen utama. Proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode secara terpadu, analisis data dilakukan secara induktif, dan temuan riset lebih terfokus pada pemahaman arti dari adanya pembuatan generalisasi.

Penelitian secara deskriptif kualitatif ialah jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif dilaksanakan oleh peneliti dalam menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu, dan menceritakan kehidupan seseorang atau kelompok dalam bentuk kronologi deskriptif. Pada penelitian ini menampilkan data yang actual atau yang sebenarnya. Dalam penelitian ini akan menampilkan temuan yang dijelaskan secara rinci yang menjadi tujuan utama daripada penelitian secara kualitatif. Riset ini akan menjabarkan secara luas berkaitan dengan temuan yang diperoleh yang sesuai dengan peristiwa tertentu yang terjadi (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).

Penelitian ini juga merupakan *Field Research* yang merupakan studi lapang dan pengumpulan datanya dilakukan di lapangan secara langsung atau di tempat terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode ini menjadi metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan sumber yang digunakan dan kemampuan tertentu dari peneliti. Tujuan dari penggunaan metode Kualitatif dalam penelitian ini karena obyek penelitian berupa proses atau kegiatan peneliti yang ingin diperoleh dengan berusaha mendapatkan gambaran yang nyata mengenai Evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa Cakrawaringin Jati terhadap peningkatan perekonomian desa di Desa Poncol, Kabupaten Magetan, (Ahmad & Laha, 2020).

### **1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pada pelaksanaan riset ini, Desa Poncol, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan menjadi Lokasi utama sebagai acuan perolehan data untuk penyelesaian masalah. Sementara itu waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan proses riset ini kurang lebih selama empat bulan. Ibukota Desa dengan Ibukota Kecamatan Poncol memiliki jarak yang sekitar 7 Km dan jarak dengan Ibukota Kabupaten Magetan 22 Km melalui jalur darat. Jarak ini umumnya dapat dilalui oleh beberapa kendaraan seperti kendaraan roda dua dan empat dengan waktu kira-kira 18 menit.

### **1.8 Fokus Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ditetapkan untuk menyaring objek kajian agar peneliti tidak kewalahan dengan banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan. Penentuan ruang lingkup ini difokuskan pada aspek kebaruan informasi yang dapat diperoleh dari kondisi ekonomi dan sosial, sehingga dapat memberi batasan pada studi kualitatif serta membantu peneliti dalam memilah data yang relevan dan yang tidak (bidin A, 2022).

Studi ini bertujuan untuk menilai efektivitas BUMDes melalui evaluasi yang dilakukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Poncol, adapun indikator yang menjadi tolak ukur adalah keberhasilan BUMDes tersebut dalam mencapai tujuan.

### **1.9 Jenis dan Sumber Data**

Data pada riset ini diperoleh dari sumber data yang merupakan objek dari riset ini. Sumber data ini sangat penting terhadap keberhasilan penelitian karena untuk mencapai hasil, keterangan, dan penjelasan yang rinci, peneliti memerlukan sumber data yang konkrit yang dapat dipergunakan pada penelitian ini.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang dihimpun langsung dari sumber pertama kali. Sumber data ini dapat berasal dari perorangan maupun kelompok. Umi Narimawati memberikan penjelasan pada karya bukunya bahwa “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi” bahwa: (Arikunto, 2022).

“Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk kompilasi maupun bentuk file. Data

ini harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang akan dijadikan informan”

Data yang bersumber dari primer ini biasanya dapat berupa wawancara bersama beberapa narasumber terkait pengelolaan BUMDes Cakra Wariingin Jati.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara sekunder ini informasi actual yang telah ada sebelumnya yang dapat dipakai oleh peneliti. Biasanya sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen yang sah seperti RPJMDes, terbitan karya desa, website desa yang resmi, artikel yang relevan dengan arah riset, buku maupun bahan literasi lain, serta dokumen pendukung lain yang relevan (Richter et al., 2023).

Pada riset ini peneliti memilih untuk menggunakan sumber data sekunder di antaranya adalah Data BPS Kabupaten Magetan, Website Desa Poncol, Buku Profil Desa Poncol Semester 1 Tahun 2024, Laporan PertanggungJawaban BUMDes 2022, dan Laporan PertanggungJawaban BUMDes 2023.

### 1.10 Teknik Pengumpulan data

Sugiyono dalam karya bukunya dengan judul “Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” memberikan penjelasan bahwasannya teknik dalam mengumpulkan data riset ini menjadi strategi dalam mengumpulkan data menjadi bagian krusial dalam penelitian karena bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan. Proses ini dapat berlangsung dalam berbagai kondisi, menggunakan beragam sumber, serta menerapkan metode yang berbeda. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan di lingkungan asli, bersumber langsung dari responden utama, dan umumnya mengandalkan observasi, wawancara, serta analisis dokumen.

#### 1. Observasi

Pada sebuah riset, observasi ini dimaknai sebagai cara penghimpunan data yang tujuannya adalah mengamati dengan

mendalam terhadap situasi yang terjadi di lapangan. Selama berlangsungnya penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap BUMDes Cakrawaringin Jati di Desa Poncol, (Apriyanti et al., 2019). Adapun jenis observasi ini ialah observasi partisipatif yang merupakan metode yang mana peneliti ikut serta dalam aktivitas sehari-hari subjek yang diamati atau dijadikan sumber data. Dengan pendekatan ini, informasi yang dikumpulkan menjadi lebih mendalam, akurat, dan mampu mengungkap makna di balik suatu fenomena. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang autentik serta memverifikasi keabsahan informasi yang diperoleh melalui wawancara.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara dua individu dengan aktivitas saling bertukar jawaban atau informasi juga ide pokok, biasanya dilakukan dengan umpan pertanyaan dan jawaban, yang bertujuan menggali hal penting pada konteks tertentu. Teknik ini digunakan dalam pengumpulan data, baik saat melakukan penelitian awal untuk mengidentifikasi masalah penelitian maupun saat peneliti ingin memperoleh informasi mendalam dari responden. Wawancara memungkinkan peneliti memahami perspektif partisipan dalam menafsirkan peristiwa yang belum terungkap melalui proses pengamatan.

Pada riset ini, metode wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi terorganisir, yang terklasifikasi ke dalam golongan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Metode ini memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan wawancara terstruktur, memungkinkan partisipan menyampaikan pandangan dan gagasan secara terbuka untuk menggali permasalahan secara lebih mendalam.

Tabel 1. 4 Informan Penelitian

| Narasumber            | Jumlah |
|-----------------------|--------|
| Kepala Desa Poncol    | 1      |
| Sekdes Desa Poncol    | 1      |
| Ketua BPD Desa Poncol | 1      |
| Pengelola BUMDes      | 3      |

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penghimpunan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen, baik dalam bentuk tertulis, visual, maupun digital. Metode dokumenter merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial, berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya, (Nilamsari, 2014). Studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap dalam riset yang dilakukan secara kualitatif yang juga menggunakan observasi dan wawancara. Kredibilitas hasil penelitian dapat meningkat jika didukung oleh bukti berupa gambar atau hasil potret, dokumen akademik, atau karya seni yang relevan. Namun, penting untuk memastikan bahwa tidak seluruhnya dokumen memiliki tingkat keandalan yang sama. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan mencakup data dari pengelola BUMDes serta berbagai informasi lain yang berkaitan dengan riset.

### **1.11 Analisis Data**

Pada riset yang dilakukan secara kualitatif, teknik analisis data berfungsi untuk menjawab permasalahan penelitian serta menguji keabsahan informasi yang sudah dirangkai pada proposal. Miles dan Huberman pada tulisan Sugiyono (2018) menyampaikan bahwa proses analisis data melibatkan tiga, yakni:

#### **1. Reduksi data**

Mereduksi data berarti menyusun kembali dan menitikberatkan pada aspek yang esensial. Informasi yang didapat dari lapangan berjumlah cukup besar, sehingga harus dicatat dengan cermat dan mendetail. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan data lewat penyederhanaan data. Maka, data yang sudah disederhanakan akan memberikan pemahaman yang lebih terang dan memudahkan peneliti dalam menghimpun informasi.

#### **2. Penyajian Data**

Dalam proses penulisan hasil riset yang dilakukan, data diuraikan dengan sistematis mulai dari bagan ataupun keterkaitan antara jenis satu

dengan yang lain, dan lainnya. Pembaca akan lebih merasa dimudahkan dalam memahami peristiwa berlangsung, masalah yang terjadi, dan perumusan uraian penyelesaian sesuai dengan apa yang sudah dimengerti. Kemudian pada proses penyajian data ini disarankan untuk membuat sajian data selain berupa naskah narasi, bisa dilakukan melalui bentuk grafik maupun diagram.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan biasanya diajukan serta bersifat tentatif dan dapat mengalami perubahan apabila belum ditemukannya fakta cukup akurat terhadap skema pengumpulan informasi selanjutnya. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang diperoleh bisa saja selaras dengan pertanyaan penelitian yang telah dirancang sejak awal, namun juga berpotensi berbeda. Hal ini disebabkan oleh sifat permasalahan dan perumusannya dalam penelitian kualitatif yang masih fleksibel dan terus berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan.

